

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 99 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERHITUNGAN SKOR UNTUK PEMBENTUKAN ORGANISASI
 UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA K/L/PEMDA/I

NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	Jumlah rata-rata nilai paket lelang pengadaan barang/jasa dalam 3 (tiga) tahun terakhir		20	
	≤ 100 M	100		20
	101 - 200 M	200		40
	201 - 300 M	300		60
	301 - 400 M	400		80
	401 - 500 M	500		100
	501 - 600 M	600		120
	601 - 700 M	700		140
	701 - 800 M	800		160
	801 - 900 M	900		180
	> 900 M	1000		200
2	Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir		20	
	≤ 25	100		20
	26 - 50	200		40
	51 - 75	300		60
	76 - 100	400		80
	101 - 125	500		100
	126 - 150	600		120
	151 - 175	700		140
	176 - 200	800		160

NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
	201 - 225	900		180
	> 225	1000		200
3	Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan jasa konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir		20	
	≤ 50	100		20
	51 - 100	200		40
	101 - 150	300		60
	151- 200	400		80
	201 - 250	500		100
	251 - 300	600		120
	301 - 350	700		140
	351 - 400	800		160
	401 - 450	900		180
	> 450	1000		200
4	Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan jasa konsultansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir		25	
	≤ 10	100		25
	11 – 30	200		50
	31 - 50	300		75
	51 - 70	400		100
	71 - 90	500		125
	91 - 110	600		150
	111 - 130	700		175
	131 - 150	800		200
	151 – 170	900		225
	> 170	1000		250
5	Jumlah rata-rata paket lelang pengadaan jasa lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir		15	
	≤ 10	100		15
	11 - 15	200		30

	16 - 20	300		45
	21 - 25	400		60
	26 - 30	500		75
	31 - 35	600		90
	36 - 40	700		105
	41 - 45	800		120
	46 - 50	900		135
	> 50	1000		150
	TOTAL SKOR MAKSIMAL			1000

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

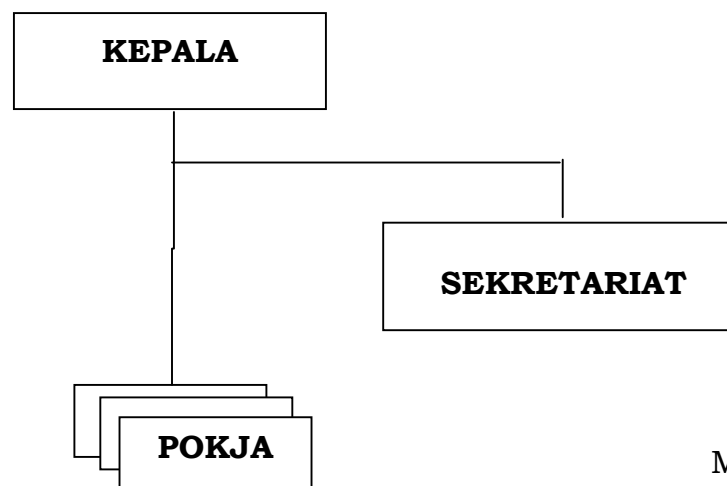
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TIPE A



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

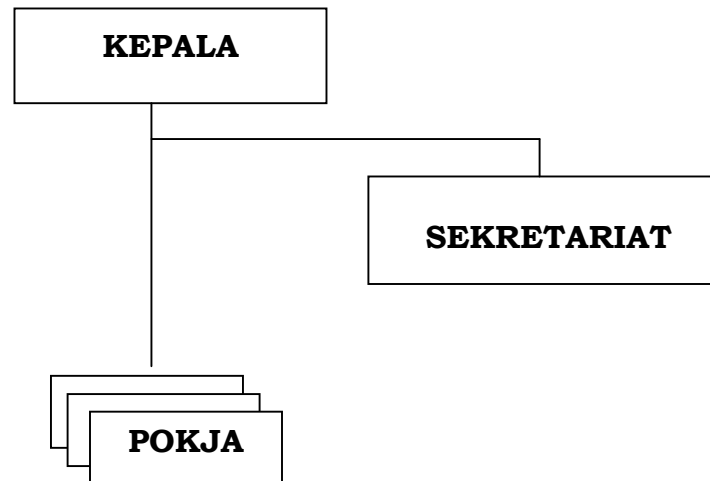
ttd

TJAHJO KUMOLO

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTATIBE B



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO